

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAN DESA (PPD)
DI DESA LONDI KECAMATAN MORI ATAS
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi
Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sintuwu Maroso**

Oleh

JEANE CLAUDIA LARIWU
NPM: 91911405171021

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

HALAMAN PENGESAHAN I

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAN DESA (PPD)
DI DESA LONDI KECAMATAN MORI ATAS
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

Oleh

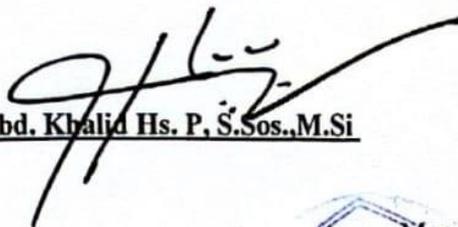
JEANE CLAUDIA LARIWU
NPM: 91911405171021

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi
Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sintuwu Maroso

Poso, 02 Juni 2023

Pembimbing I


Abd. Khalid Hs. P., S.Sos., M.Si

Pembimbing II


Abdu Malik Saleh, S.Sos., M.AP

Mengetahui:
Ketua Jurusan
Administrasi Publik


Fitria Y. Alim, S.Sos., M.Si
NIDN 092909790

HALAMAN PENGESAHAN II

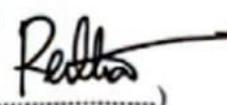
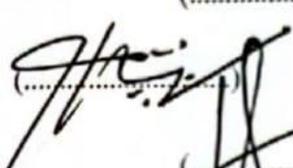
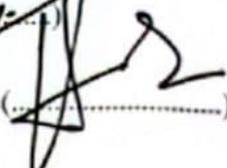
Telah diterima oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Publik, setelah dipertanggungjawabkan dalam Ujian Skripsi pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023.

Panitia Ujian :

Ketua/Penguji : Drs. Alif Y. Walenta, M.PA
Sekretaris/Penguji : Abd. Khalid Hs. Pandipa, S.Sos., M.Si
Anggota/Penguji : Fitria Y. Alim, S.Sos., M.Si

Majelis Tim Penguji :

1. Drs. Alif Y. Walenta, MPA
2. Margaretha Badu, S.Sos., M.Si
3. Abdul Khalid Hs. Pandipa, S.Sos., M.Si
4. Abdul Malik Saleh, S.Sos., M.AP

()
()
()
()

Poso, 15 Juni 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Drs. ALIF Y. WALENTA, M.PA
NIDN. 09 060664 01

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diteliti sebelumnya untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister atau doktor), baik di Universitas Sintuwu Maroso maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan dan rumusan dari saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing dan masukan dari Tim Penguji.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Poso.....2023

Yang membuat pernyataan



JEANE CLAUDIA LARIWU

NPM: 91911405171021

ABSTRAK

JEANE CLAUDIA LARIWU. 2023. “*Efektivitas Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara*”. Dibimbing oleh Abd. Khalid Hs. P dan Abdul Malik Saleh.

Kata Kunci: *Efektivitas Program Pemberdayaan Desa (PPD)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa Londi, sekretaris desa, staf pegawai desa dan masyarakat desa londi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara meliputi 4 indikator pendukung di dalamnya yaitu kemampuan masyarakat dalam berusaha, kemampuan untuk bangkit, kemampuan untuk mengembangkan dan kemampuan untuk memberikan respon positif. Beberapa permasalahan terkait Program Pemberdayaan Desa di Desa Londi diantaranya lambatnya proses pengembangan desa dikarenakan kurangnya kerjasama baik itu pemerintah desa dan masyarakatnya. Pemerintah desa juga kurang bersinergi dengan masyarakat yang mengakibatkan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan sumber daya manusia belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Program Pemberdayaan Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, kurangnya komunikasi, serta kurangnya inovasi Desa.



ABSTRACT

JEANE CLAUDIA LARIWU. 2023. *"Effectiveness of the Village Empowerment Program (PPD) in Londi Village, Mori Atas Sub-District, North Morowali Regency."* Supervised by Abd. Khalid Hs.P and Abdul Malik Saleh.

Keywords: *Effectiveness of the Village Empowerment Program (PPD)*

This research aims to find out the effectiveness of the Village Empowerment Program (PPD) in Londi Village, Mori Atas SubDistrict, North Morowali Regency, and the factors that influence it. The informants in this research were the Londi village head, village secretary, village staff and the Londi village community. This research uses qualitative descriptive methods and data collection techniques using interview, documentation and observation methods. The results of the research show that the Village Empowerment Program (PPD) in Londi Village, Mori Atas District, North Morowali Regency includes 4 supporting indicators, namely the community's ability to do business, the ability to rise, the ability to develop and the ability to provide a positive response. Several problems related to the Village Empowerment Program in Londi Village include the slow village development process due to a lack of cooperation between the village government and the community. The village government also lacks synergy with the community, which results in economic development based on local potential and human resources not being fully managed. The Village Empowerment Program is influenced by several factors, including: Lack of quality human resources (HR), lack of communication, and lack of Village innovation.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN I	ii
HALAMAN PENGESAHAN II	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR	
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Efektivitas	9
2. Definisi Desa.....	15

3. Pemberdayaan Desa.....	17
B. Landasan Teoritis dan Kepustakaan yang Relevan.....	21
C. Alur Pikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Dasar Penelitian	23
1. Tipe Penelitian	23
2. Dasar Penelitian	23
B. Definisi Konsep	23
C. Jenis Data.....	25
D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	25
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Analisis Data	27
G. Lokasi Penelitian.....	28
H. Waktu dan Jadwal Penelitian.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	30
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu unit pemerintahan terkecil dari segi jumlah penduduk, desa dibawah pemerintahan Kecamatan, yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan warganya membentuk tatanan sosial wilayah tersebut. Dalam situasi ini, desa memiliki kewenangan yang memadai dan menjadi tempat dimana masyarakat dapat mengaktualisasikan kepentingannya guna memenuhi tuntutan secara keseluruhan. Sebagai satu sistem perencanaan pembangunan kota, desa berhak atas pembangunan di segala bidang. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyerahkan seluruh dokumen terkait kepada desa.

Pemerintah secara aktif berinisiatif untuk membantu perekonomian masyarakat miskin. Selain untuk kemajuan bangsa, ada upaya untuk mencapai keadilan publik. Agar suatu komunitas tumbuh secara adil, semua strata sosial harus mendapat perhatian khusus. Pemerintah harus bertindak adil, khususnya dengan menerapkan kebijakan dan tindakan yang mendorong pembangunan yang proporsional, (Abdullah, 2009).

Setiap program kesejahteraan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah harus mampu mengatasi masalah kemiskinan. Keterlibatan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial publik merupakan aspek penting lain dari pertumbuhan

kesejahteraan umum masyarakat karena pemerintah tidak dapat memajukan pembangunannya sendiri tanpa mempertimbangkan semua aspek masyarakat lainnya.

Suatu bentuk kemitraan yang digambarkan sebagai kerjasama pihak yang bermodal dengan pihak yang memiliki keahlian atau prospek usaha dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan diperlukan untuk menjamin kemakmuran seluruh masyarakat, (Gamal, 2004). Pembangunan ekonomi rakyat tidak dapat dicapai hanya melalui pertumbuhan. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk mempercepat perubahan struktural guna memperbaiki posisi dan fungsi ekonomi manusia dalam perekonomian jika kita ingin mencapainya.

Maka membuka akses ekonomi masyarakat terhadap pembiayaan merupakan langkah yang cukup mudah dilakukan. Untuk menumbuhkan produksi pendapatan, menciptakan surplus, dan menggunakan surplus itu untuk membayar kembali pinjaman dan melakukan pemupukan kapital, kapital kredit yang sesuai perlu tersedia, (Kartasasmita, 1996).

Saat ini, istilah "pedesaan" dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa lokasi. Penduduk pedesaan umumnya mengalami keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan. Masyarakat miskin juga mengalami kesulitan ekonomi karena tidak adanya akses masyarakat terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi.

Promosi desa sebagai pusat pelayanan dan pembangunan membutuhkan administrasi pusat dan koordinasi lokal yang efektif. Dengan anggaran sebesar Rp 20,76 triliun, pemerintah menjalankan program satu desa satu miliar sejak 2015. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mempercepat pembangunan pedesaan. Dengan anggaran yang cukup besar yang dialokasikan ke setiap desa, diperlukan sumber daya manusia untuk mengelola sesuai peraturan desa yang berlaku dan menempatkan dana untuk pembangunan desa. Salah satu pilihan pembangunan desa adalah dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan membuka peluang bagi desa untuk menghasilkan pendapatan. Masyarakat memiliki potensi untuk menjadi tujuan wisata dan memiliki manfaat ekonomi lainnya. Sehingga diperlukan strategi pemberdayaan yang mengembangkan potensi ekonomi lokal bagi desa.

Istilah "daya" secara etimologis adalah kata dasar dari konsep pemberdayaan yang menunjukkan kemampuan dan kekuatan. Berdasarkan pemahaman ini, pemberdayaan adalah proses memberi dan mendapatkan kekuatan dan kemampuan sambil menggiling menuju tujuan. Ada 2 nilai yang terkandung dalam pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka, (1996) yaitu memberi seseorang otoritas atau kekuasaan adalah definisi utama dari pemberdayaan diikuti dengan kemampuan. Karena pemberdayaan mungkin efektif jika individu atau organisasi yang memperoleh kekuasaan secara otomatis memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan. Memberi seseorang kemampuan untuk melakukan sesuatu adalah definisi pemberdayaan yang kedua.

Pemberian keterampilan atau kemampuan kepada seseorang atau kelompok yang kurang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu merupakan bagian dari proses pemberdayaan.

Dari banyak interpretasi, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan menyebabkan seseorang bertindak sesuai dengan tujuan dan kekuatan tertentu yang dimilikinya. Proses dimana pemerintah memberikan desa pengetahuan dan alat yang mereka butuhkan untuk melakukan kegiatan pembangunan sambil memaksimalkan partisipasi lokal disebut sebagai pemberdayaan masyarakat.

Intervensi atau campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu masalah yang menghambat keberhasilan program pemberdayaan desa. Akibatnya, menghambat inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan dan pengoperasian ekonomi pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak efektif dan berdampak negatif terhadap kemandirian dengan meningkatnya ketergantungan pada bantuan pemerintah. Dengan menggunakan kapasitas partisipasi lokal, pemerintah harus melakukan inisiatif pembangunan bagi masyarakat desa. “Pemusatan” perhatian ke pedesaan dari berbagai elemen permasalahan yang dihadapi merupakan faktor kedua yang tidak dilakukan secara serius melalui program-program lintas sektoral yang terintegrasi satu sama lain. Dengan menggunakan kapasitas partisipasi lokal, pemerintah harus melakukan inisiatif pembangunan bagi masyarakat desa.

Program Pemberdayaan Desa berupaya untuk meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dengan memperbesar kesempatan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akses terhadap modal, mengingat beberapa sumber kemajuan ekonomi tersebut di atas masih merupakan barang yang langka bagi kelompok masyarakat lemah. dan merupakan penghalang utama untuk pemberdayaan mereka. Isu utama dan keterbelakangan masyarakat lapisan bawah adalah modal kecil, peluang teknologi rendah dan kesempatan kerja terbatas, yang mendorong pemerintah mempertimbangkan untuk menawarkan bantuan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu yang dikenal dengan “Dana Usaha Desa/Kelurahan” untuk membantu orang keluar dari krisis ekonomi.

Potensi sumber daya alam di desa Londi umumnya diarahkan pada sektor pertanian dan perkebunan karena memiliki potensi yang cukup baik. Pemanfaatan kekayaan alamnya ini tidak lepas dari peran pemerintah desa yang terus menerus memberikan program-program guna memaksimalkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Program-program tersebut berupa pelatihan dan pembangunan infrastruktur yang berguna bagi kepentingan masyarakat yang dapat mengatasi masalah yang terjadi didalam masyarakat serta peningkatan mutu dari hasil produksi. Melalui program-program tersebut, pemerintah dapat menyalurkan bantuan yang berupa bantuan material maupun non material. Penyaluran bantuan non material umumnya yaitu pelatihan masyarakat, pelatihan aparatur desa dan penyuluhan di desa tersebut. Sedangkan yang berupa material

berupa fasilitas-fasilitas yang menunjang hasil produksi masyarakat seperti irigasi, lumbung padi, penyediaan obat-obatan dan pupuk.

Salah satu desa yang memiliki berbagai potensi seperti ini di Kabupaten Morowali Utara yaitu Desa Londi yang terletak di Kecamatan Mori Atas. Mengingat kondisi alam Desa Londi memiliki potensi yang bervariasi antara lain dibidang pertanian yaitu padi dan jagung, dibidang perkebunan yaitu kakao dan dibidang peternakan. Untuk mengelola sumber daya yang ada, pemerintah membuat Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Londi.

Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang ada di Desa Londi sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Diketahui bahwa program pemberdayaan desa yang sudah terlaksana di Desa Londi yaitu pelatihan kepala desa dan penyuntikan terhadap hewan ternak.

Berdasarkan observasi awal peneliti tentang Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Londi belum berjalan efektif. Peneliti menemukan beberapa masalah, yakni: Pertama dari aspek kemampuan masyarakat dalam berusaha, kurangnya perhatian masyarakat memelihara dan merawat fasilitas yang tersedia, kedua aspek kemampuan untuk bangkit, kurangnya permodalan sehingga masyarakat menggantungkan hidup mereka pada pihak bank untuk memberikan modal, ketiga aspek kemampuan untuk mengembangkan, usaha masyarakat

tidak meningkat dalam hal produktivitas karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program pemberdayaan desa dan keempat aspek kemampuan untuk memberikan respon positif, kurangnya kemampuan masyarakat terhadap responpositif sehingga dapat memperluas jumlah petani yang dapat membantu masyarak memenuhi kewajiban satu sama lain.

Berdasarkan permasalahan diatas mendorong minat peneliti untuk melakukan penelitian terhadap Program Pemberdayaan Desa. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Efektivitas Program Pemberdayan Desa (PPD) di Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas maka rumusan masalah dari pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana efektivitas Program Pemberdayan Desa (PPD) di Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Program Pemberdayan Desa (PPD) di Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebaga berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas Program Pemberdayan Desa (PPD) di Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Akademis:

- 1) Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan persiapan skripsi, sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi tujuan studi program sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sintuwu Maroso.
- 2) Diharapkan dapat menambah literatur, referensi, dan sumber informasi ilmiah. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai panduan untuk penelitian serupa di masa mendatang.

b. Secara Praktis:

Sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya terkait Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Desa Londi Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, Herman. (2009). *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*. Jakarta: RM Book
- Abdulrahmat. (2003). *Efektivitas Implementasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungkaes *et al* (2013). *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Acta Diurna.
- Eko Sutoro. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: APMD. Press
- Farida, Ai Siti. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Gamal, Merza. (2004). *Ekonomi Syariah*. Pekanbaru: UNRI Press
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly. (2001). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, dan proses, terjemahan Agus Dharma*. Jakarta: Erlangga
- Gibson. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, S. (2006). *Pengertian Efektivitas Dan Landasan Efektivitas*. Bandung: Alfabeta.
- Ife. Jim. (2008). *Konsep Pemberdayaan dan Pengertian Pemberdayaan*. Bandung: Humaniora.
- Karta Sasmita, Ginanjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. (2019) *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

- Miles dan Huberman. 2007. *Metode Penelitian Teknik Analisis Data*. Malang: Citra Intrans Selaras.
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Putra
- Mulyasa. (2002). *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Munir, Miftahul. (2017) *RPJMDES Desa Dukuh Dempok. (Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2017)*
- Prijono, Onny S dan Pranarka. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS
- Siagian, Sondang P. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*. Jakarta: Rineka Cipta
- Singarimbun, M. (2006) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Soewarno, Hardyaningrat. (2004). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Malang: Citra Intrans Selaras.
- Steers, M. Richard. (1999). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Air Langga
- Sumodiningrat, Gunawan. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: IDEA
- Wasistiono, Sadu & Irwan Tahir. (2006): *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. (2007). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zulkarnain. (2008). *Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Rosdakarya

C. Dokumen

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.